



Peran Dinas Koperasi Dalam Optimalisasi *e-Katalog* Sebagai Sarana Pemberdayaan UMKM di Sidoarjo

Renza Nadya Jala Saputri¹, Bunga Nadiya², Tyas Anjarwati³, Aurelia Septianti⁴ & Oktarizka Reviandani⁵

Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur, Surabaya, Indonesia

*Corresponding author

E-mail addresses: 22041010142@student.upnjatim.ac.id

ARTICLE INFO

Article history:

Received May 31, 2025

Revised June 02, 2025

Accepted June 11, 2025

Available online June 19, 2025

Kata Kunci:

Dinas Koperasi; *e-Katalog*; UMKM; Pemberdayaan; Digital

Keywords:

Cooperative Office; *e-Catalog*; MSME; Empowerment; Digital



This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.
Copyright © 2025 by Author. Published by Yayasan Sagita Akademia Maju..

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji peran Dinas Koperasi dalam optimalisasi E-Katalog sebagai sarana pemberdayaan UMKM di Sidoarjo. Program E-Katalog merupakan inisiatif penting untuk membantu Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam memperluas jangkauan pasar dan meningkatkan daya saing di era digital. Fokus penelitian adalah menganalisis bagaimana Dinas Koperasi menjalankan perannya dalam mendukung UMKM untuk bergabung dan memanfaatkan platform E-Katalog, serta mengidentifikasi manfaat yang dirasakan UMKM dan kendala yang dihadapi selama proses pendaftaran dan penggunaan. Selain itu, penelitian ini juga mengevaluasi kualitas pendampingan yang diberikan oleh Dinas Koperasi, kesiapan UMKM dalam adaptasi teknologi digital, dan tingkat kepuasan mereka terhadap program. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan saran dan rekomendasi kepada Dinas Koperasi untuk pengembangan program E-Katalog yang lebih efektif dan bermanfaat bagi pelaku UMKM di masa depan, serta memberikan kontribusi pada pemahaman tentang strategi pemberdayaan ekonomi lokal

melalui platform digital.

ABSTRACT

This research examines the role of the Cooperative Office in optimizing E-Catalog as a means of empowering MSMEs in Sidoarjo. The E-Catalog program is an important initiative to help Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) expand their market reach and improve competitiveness in the digital era. The research focuses on analyzing how the Cooperative Office plays its role in supporting MSMEs to join and utilize the E-Catalog platform, as well as identifying the benefits MSMEs feel and the obstacles faced during the registration and usage process. In addition, this study also evaluates the quality of assistance provided by the Cooperative Office, the readiness of MSMEs in adapting to digital technology, and their level of satisfaction with the program. The results of this study are expected to provide suggestions and recommendations to the Cooperative Office for the development of a more effective and beneficial E-Catalog program for MSME actors in the future, as well as contribute to the understanding of local economic empowerment strategies through digital platforms.

1. PENDAHULUAN

Pembangunan ekonomi suatu negara tidak terlepas dari peran serta pemerintah dalam melakukan pemberdayaan masyarakat. Salah satu tujuan utama pembangunan ekonomi adalah menciptakan lapangan pekerjaan, meningkatkan produktivitas barang dan jasa, serta memperkuat daya saing ekonomi nasional (Tarigan, 2022). Di Indonesia, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) menjadi sektor strategis yang berperan besar dalam mendukung perekonomian nasional.

Menurut Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, UMKM tidak hanya memberikan kontribusi signifikan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), tetapi juga menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar (Handayani, 2023). Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UKM, jumlah UMKM saat ini mencapai 64,2 juta unit usaha, dengan kontribusi terhadap PDB sebesar 61,07% atau senilai Rp8.573,89 triliun. Selain itu, UMKM juga menyerap sekitar 97% dari total tenaga kerja di Indonesia, yaitu sekitar 117 juta pekerja (Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, 2021). Hal ini menunjukkan bahwa UMKM memiliki potensi besar dalam memperkuat struktur perekonomian, mengurangi tingkat pengangguran, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Seiring dengan perkembangan teknologi di era digital, pelaku UMKM dituntut untuk beradaptasi dengan transformasi digital agar tetap bertahan dan bersaing dalam pasar yang semakin kompetitif. Digitalisasi memberikan banyak manfaat bagi UMKM, termasuk kemudahan akses pasar, efisiensi operasional, serta peningkatan daya saing produk (Evangeulista, 2023). Salah satu bentuk digitalisasi adalah melalui pemanfaatan e-commerce atau platform belanja online seperti Shopee, Tokopedia, dan Bukalapak yang memungkinkan UMKM untuk menjangkau pasar yang lebih luas.

Kabupaten Sidoarjo merupakan salah satu daerah dengan perekonomian yang berkembang pesat di Jawa Timur. Pertumbuhan ini ditopang oleh sektor industri pengolahan, perdagangan, serta jasa, yang sebagian besar melibatkan UMKM. Keberadaan UMKM di Sidoarjo menjadi tulang punggung dalam mendukung Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) daerah. Oleh karena itu, perlu adanya dukungan kebijakan dan inovasi pemerintah daerah untuk mendorong pemberdayaan UMKM secara berkelanjutan.

Salah satu bentuk intervensi pemerintah adalah melalui Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Sidoarjo yang mendorong pemanfaatan teknologi digital seperti e-Katalog lokal. E-Katalog lokal merupakan sistem digital pengadaan barang dan jasa pemerintah yang dapat diakses oleh pelaku UMKM untuk memasarkan produk kepada instansi pemerintah. Upaya ini merupakan langkah strategis untuk mendorong partisipasi UMKM dalam pengadaan barang/jasa, memperluas pasar, dan memperkuat daya saing lokal di era digital.

Gambar 1. Pertumbuhan Ekonomi Sidoarjo Tahun 2024



Sumber: BPS Kabupaten Sidoarjo Tahun 2024

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Sidoarjo, perekonomian daerah ini pada tahun 2024 mengalami pertumbuhan sebesar 5,54 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Pertumbuhan ini mencerminkan pemulihan ekonomi yang cukup signifikan pasca pandemi dan tantangan global. Dari sisi produksi, sektor dengan pertumbuhan tertinggi adalah Jasa Lainnya (9,51%), Administrasi Pemerintahan dan Jaminan Sosial (8,48%), serta Pengadaan Listrik dan Gas (8,02%). Pertumbuhan ini menunjukkan peningkatan aktivitas sektor jasa, industri, dan layanan publik yang mendukung stabilitas ekonomi daerah.

Namun, tidak semua sektor menunjukkan kinerja positif. Lapangan Usaha Pertambangan dan Penggalian mengalami kontraksi sebesar 5,41 persen. Meskipun demikian, struktur perekonomian Kabupaten Sidoarjo tetap didominasi oleh sektor industri pengolahan dengan kontribusi sebesar 48,57% terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), diikuti oleh perdagangan besar dan eceran (15,98%) serta transportasi dan pergudangan (13,81%). Dari sisi pengeluaran, pertumbuhan tertinggi terjadi pada Pengeluaran Konsumsi Lembaga Non-Profit yang Melayani Rumah Tangga (PK-LNPRT) sebesar 13,45%, menunjukkan peran aktif lembaga sosial dalam perekonomian daerah.

Sebagai salah satu pusat industri dan perdagangan di Jawa Timur, Kabupaten Sidoarjo memiliki sebanyak 171.264 unit usaha, yang terdiri dari 154.891 usaha mikro, 16.000 usaha kecil, dan 154 usaha menengah (Kurniawan, 2024). UMKM di Sidoarjo didominasi oleh sektor kuliner, fashion, dan kerajinan tangan. Jumlah pelaku UMKM yang besar ini mencerminkan potensi signifikan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi lokal, sehingga memerlukan dukungan dan pemberdayaan yang lebih sistematis, salah satunya melalui digitalisasi dan pemanfaatan e-Katalog lokal sebagai sarana perluasan akses pasar.

Tabel 1. Data Keseluruhan UMKM Sidoarjo

Kategori UMKM	Jumlah Unit Usaha	Contoh Usaha	Modal Usaha
Usaha Mikro	154.891	Pedagang kaki lima, warung makan kecil, jasa cuci motor	≤ Rp1 miliar
Usaha Kecil	16.000	Restoran kecil, konveksi rumahan, toko sembako skala besar	Rp1 - Rp5 miliar
Usaha Menengah	154	Pabrik makanan skala menengah, hotel kecil, distributor bahan pokok	Rp5 - Rp10 miliar
Total UMKM	171.264	-	-

Namun, meskipun UMKM berkembang, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kabupaten Sidoarjo masih menjadi yang tertinggi di Jawa Timur, yakni 6,49% pada tahun 2024. Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan UMKM belum sepenuhnya mampu mengatasi permasalahan pengangguran di daerah. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada rentang tahun 2022-2024 di Kabupaten/Kota sebagai berikut:

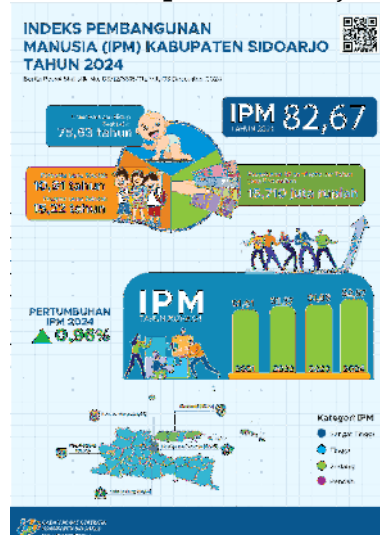
Tabel 2. Data TPT Kabupaten Sidoarjo Tahun 2024

Kabupaten/Kota	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)		
	2022	2023	2024
Kabupaten Pacitan	3,65	1,83	1,56
Kabupaten Blitar	5,45	4,91	4,77
Kabupaten Kediri	6,83	5,79	5,1
Kabupaten Malang	6,57	5,7	5,13
Kabupaten Lumajang	4,97	3,67	3,28
Kabupaten Jember	4,06	4,01	3,23
Kabupaten Pasuruan	5,91	5,48	5,02
Kabupaten Sidoarjo	8,8	8,05	6,49
Kabupaten Mojokerto	4,83	4,67	3,87
Kabupaten Jombang	5,47	4,66	3,75
Kabupaten Nganjuk	4,74	4,68	3,87
Kota Blitar	5,39	5,24	5,11
Kota Malang	7,66	6,8	6,1
Kota Pasuruan	6,18	5,64	4,63
Kota Mojokerto	5,05	4,73	3,76
Kota Madiun	6,39	5,85	4,3
Kota Surabaya	7,62	6,76	4,91
Kota Batu	8,43	4,52	3,63

Sumber: BPS Kabupaten Sidoarjo 2024

Berdasarkan data tersebut diketahui bahwa jumlah persentase Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kabupaten Sidoarjo tahun 2024 tercatat sebesar 6,49%, masih menjadi yang tertinggi di antara kabupaten/kota lain meskipun mengalami penurunan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Kondisi ini menunjukkan perlunya upaya konkret dari pemerintah daerah untuk mengurangi pengangguran, salah satunya melalui pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). UMKM memiliki peran strategis dalam menciptakan lapangan kerja baru dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Amanda, 2022). Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021, pemerintah berkewajiban memberikan kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan bagi koperasi serta pelaku UMKM guna mendorong pertumbuhan ekonomi daerah (peraturan.bpk.go.id).

Gambar 3. IPM Kabupaten Sidoarjo Tahun 2024



Sumber: BPS Kabupaten Sidoarjo 2024

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Sidoarjo pada tahun 2024 mencapai 82,67, meningkat 0,96% dari tahun sebelumnya. Peningkatan ini mencerminkan kemajuan dalam kesehatan, pendidikan, dan standar hidup masyarakat. UMKM menjadi salah satu faktor utama pendukung peningkatan IPM karena berperan dalam menyerap tenaga kerja dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat.

Namun, UMKM di Sidoarjo masih menghadapi tantangan, terutama dalam hal digitalisasi dan daya saing. Banyak pelaku UMKM belum memanfaatkan teknologi digital secara optimal, termasuk dalam branding dan pemasaran online (Azizatul et al., 2024). Kurangnya keterampilan digital menjadi hambatan utama dalam memperluas pasar dan meningkatkan produktivitas.

Sebagai respons, Pemerintah Kabupaten Sidoarjo melalui Dinas Koperasi dan Usaha Mikro telah mengembangkan program E-Katalog Lokal sebagai bagian dari strategi digitalisasi. Program ini memberi peluang bagi UMKM untuk masuk dalam ekosistem pengadaan barang dan jasa pemerintah. Hingga 2024, sekitar 1.700 dari 176.000 UMKM di Sidoarjo telah memanfaatkan platform ini (Setda Kabupaten Sidoarjo, 2024).

Gambar 4. Tampilan e-Katalog



Sumber : Website E-Katalog

Dasar hukum pelaksanaan E-Katalog di Indonesia diatur dalam Perpres No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (diubah dengan Perpres No. 12 Tahun 2021) serta Peraturan Lembaga LKPP No. 9 Tahun 2021 tentang Toko Daring dan Katalog Elektronik. Regulasi ini memberi peluang bagi UMKM untuk menjadi penyedia barang dan jasa pemerintah secara digital, guna mendorong pemerataan ekonomi, pemberdayaan UMKM, serta efisiensi dan transparansi pengadaan.

Namun, adopsi E-Katalog oleh UMKM masih rendah. Di Kabupaten Sidoarjo, baru sekitar 1.700 dari 176.000 UMKM yang bergabung (Setda Kabupaten Sidoarjo, 2024). Rendahnya partisipasi disebabkan oleh kurangnya literasi digital di kalangan pelaku UMKM, khususnya usaha mikro dan kecil (Handayani, 2023).

Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sidoarjo telah melakukan pelatihan dan pendampingan untuk mendukung digitalisasi UMKM. Namun, efektivitas upaya tersebut masih perlu dikaji lebih lanjut. Penelitian ini difokuskan untuk mengevaluasi peran Dinas Koperasi dalam mengembangkan dan mengimplementasikan E-Katalog, serta mengidentifikasi kendala yang dihadapi oleh dinas dan pelaku UMKM dalam proses optimalisasi tersebut.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi dan menganalisis strategi yang diterapkan oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sidoarjo dalam mendukung pengembangan digitalisasi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), khususnya melalui optimalisasi penggunaan E-Katalog sebagai sarana pemberdayaan ekonomi lokal.

Peran pemerintah memiliki kontribusi penting dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat, khususnya dalam mendukung UMKM. Soerjono Soekanto menyatakan bahwa peran merupakan aspek dinamis dari status atau kedudukan yang dijalankan melalui hak dan kewajiban. Menurut Dwiyanto, peran pemerintah dalam pemberdayaan UMKM mencakup penyediaan akses terhadap sumber daya (modal, pasar, teknologi), fasilitasi dan pembinaan seperti pelatihan teknis, penciptaan kebijakan yang mendukung perkembangan usaha, serta peningkatan kapasitas pelaku UMKM dalam aspek manajerial dan inovasi. Yusuf (2014) menambahkan bahwa pemerintah berperan sebagai regulator yang menyusun kebijakan, fasilitator yang menyediakan pelatihan dan akses pendanaan, serta dinamisator yang mendorong semangat kewirausahaan dan adopsi teknologi di kalangan UMKM.

Pemberdayaan UMKM merujuk pada upaya peningkatan daya saing dan kemandirian pelaku usaha, sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008. Beberapa aspek utama pemberdayaan UMKM antara lain adalah pemberian akses terhadap pasar dan teknologi (seperti penggunaan E-Katalog), peningkatan keterampilan manajerial, fasilitasi pemasaran melalui platform digital, serta pendampingan yang berkelanjutan. Menurut Ife & Tesoriero, pemberdayaan yang efektif tidak hanya memberikan bantuan, tetapi juga mendorong partisipasi aktif dari pelaku UMKM untuk mandiri dan berkembang.

Sementara itu, transformasi digital sektor publik merupakan bagian dari reformasi birokrasi melalui pemanfaatan teknologi informasi. Menurut Tassabehji (2016), transformasi digital tidak sekadar penerapan teknologi, tetapi juga mencakup perubahan struktur, budaya organisasi, dan cara kerja instansi publik. Tujuan

utamanya adalah meningkatkan efisiensi pelayanan, transparansi, dan partisipasi masyarakat. Dalam konteks UMKM, transformasi digital seperti penggunaan E-Katalog menjadi instrumen penting untuk memperluas pasar dan mempercepat layanan pemerintah secara lebih inklusif dan modern.

2. METODE

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Penelitian kualitatif berfokus pada deskripsi dan pemahaman mendalam mengenai fenomena yang diteliti, sedangkan pendekatan studi kasus digunakan untuk menganalisis suatu fenomena yang masih terikat oleh ruang dan waktu dengan memaparkan kejadian yang sebenarnya terjadi di lapangan. Dalam konteks penelitian ini, studi kasus diterapkan untuk meneliti strategi yang dilakukan oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sidoarjo dalam pengembangan digitalisasi UMKM. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan beberapa metode untuk memperoleh informasi yang relevan dan mendalam mengenai Strategi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro dalam Pengembangan Digitalisasi UMKM di Kabupaten Sidoarjo. Menurut Sugiyono (2019), teknik pengumpulan data dalam penelitian kualitatif dapat dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Dalam penelitian ini, analisis data dilakukan secara induktif, yaitu dilakukan sebelum penelitian dimulai, selama penelitian berlangsung, dan setelah penelitian selesai. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan model Miles dan Huberman (Sugiyono, 2016), yang terdiri dari empat tahap utama, yaitu pengumpulan data, kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sidoarjo

Kabupaten Sidoarjo, yang terletak strategis di Provinsi Jawa Timur dan berbatasan langsung dengan Kota Surabaya, memiliki peran penting dalam kawasan metropolitan. Dengan luas sekitar 719,34 km² dan populasi hampir 2 juta jiwa, daerah ini mengalami urbanisasi pesat serta tantangan geografis seperti banjir dan semburan lumpur Lapindo. Ekonomi Sidoarjo ditopang oleh sektor industri pengolahan, perdagangan, dan konstruksi, serta peran signifikan dari sektor UMKM. Pemerintah setempat mengusung visi pembangunan berkelanjutan dengan fokus pada transformasi digital, tata kelola pemerintahan modern, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat

Gambar 5. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sidoarjo



Sumber: dokumen pribadi

Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sidoarjo adalah lembaga yang bertugas memberdayakan koperasi dan pelaku usaha mikro melalui kebijakan dan layanan publik. Dinas ini memainkan peran penting dalam pengembangan ekonomi kerakyatan di daerah, dengan sasaran utama lebih dari 160.000 unit UMKM yang tersebar di wilayah Sidoarjo. Program yang dijalankan meliputi pelatihan, fasilitasi permodalan, bantuan sarana usaha, serta promosi dan digitalisasi produk UMKM.

Visi dinas ini adalah mewujudkan koperasi dan usaha mikro yang mandiri, sehat, tangguh, dan berdaya saing guna menciptakan masyarakat sejahtera. Misi strategisnya mencakup peningkatan kelembagaan koperasi, akses permodalan, peningkatan kapasitas SDM, pengembangan ekosistem usaha mikro yang inklusif, serta promosi produk lokal melalui digitalisasi. Hal ini sejalan dengan kebijakan nasional seperti Perpres No. 2 Tahun 2022 tentang pengembangan kewirausahaan nasional.

Gambaran Umum Pelaksanaan Program e-Katalog UMKM

Pelaksanaan Program E-Katalog UMKM bertujuan untuk memperkuat peran UMKM dalam sistem pengadaan barang/jasa pemerintah melalui platform digital. Upaya ini merupakan bagian dari kebijakan strategis nasional yang dicanangkan oleh Presiden RI guna mendorong pertumbuhan ekonomi lokal dan pemerataan pembangunan.

1. Landasan Hukum dan Kebijakan

Program ini dilaksanakan berdasarkan berbagai regulasi, termasuk:

- Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022
- Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP)
- Peraturan Menteri/Lembaga terkait pengadaan

Regulasi-regulasi tersebut mewajibkan instansi pemerintah untuk mengalokasikan sebagian anggaran belanja bagi produk UMKM yang tayang di e-Katalog.

2. Tujuan Pelaksanaan

- Memberikan akses pasar yang lebih luas bagi UMKM
- Meningkatkan transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas pengadaan barang/jasa
- Mendorong digitalisasi proses bisnis UMKM

3. Mekanisme Pelaksanaan

Tahapan utama dalam pelaksanaan program meliputi:

- Pendaftaran UMKM ke dalam sistem e-Katalog melalui aplikasi SIKAP dan e-Katalog LKPP
- Proses kurasi produk, baik secara manual maupun digital, untuk menilai kelayakan produk
- Verifikasi administrasi dan legalitas usaha UMKM
- Pendampingan dan pelatihan teknis, yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah pusat maupun daerah

- Publikasi dan penayangan produk di e-Katalog nasional, lokal, sektoral, atau komoditas

4. Peran Pemerintah Daerah

Pemerintah daerah memiliki tanggung jawab dalam mendorong pelaku UMKM lokal untuk bergabung dalam e-Katalog. Mereka juga memfasilitasi pelatihan, pembinaan, serta penyediaan infrastruktur dan teknologi pendukung.

5. Tantangan dalam Pelaksanaan

Beberapa kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan program ini meliputi:

- Kurangnya pemahaman pelaku UMKM terhadap sistem e-Katalog
- Rendahnya literasi digital dan kapasitas SDM UMKM
- Masih terbatasnya produk yang memenuhi standar kurasi
- Hambatan teknis dalam proses registrasi dan tayang produk

6. Upaya Perbaikan

Untuk mengatasi kendala tersebut, dilakukan berbagai inisiatif seperti:

- Sosialisasi dan pelatihan masif kepada UMKM
- Penyederhanaan proses kurasi
- Dukungan lintas sektor antara pemerintah, asosiasi UMKM, dan swasta.

Strategi Dinas Koperasi dalam Optimalisasi e-Katalog UMKM

1. Peran Dinas sebagai Regulator, Fasilitator, dan Dinamisator

Program e-katalog lokal yang diinisiasi oleh LKPP merupakan wujud transformasi digital dalam sistem pengadaan barang dan jasa pemerintah, yang sekaligus membuka peluang lebih besar bagi pelaku UMKM untuk terlibat langsung dalam belanja publik. Melalui sistem ini, UMKM dapat memasarkan produknya secara langsung kepada instansi pemerintah tanpa melalui proses tender, sehingga proses menjadi lebih cepat, transparan, dan efisien serta memperluas akses pasar UMKM.

Di Kabupaten Sidoarjo, pelaksanaan program ini menjadi tanggung jawab Dinas Koperasi dan Usaha Mikro. Peran dinas tidak hanya sebatas administratif, melainkan juga mencakup fungsi strategis seperti penyusunan regulasi pendukung,

pendampingan UMKM dalam proses digitalisasi, dan pembentukan ekosistem usaha yang mendukung keberlanjutan UMKM di sektor pengadaan pemerintah.

Gambar 6. Aspek SWOT E-Katalog Kabupaten Sidoarjo

Aspek	Uraian
Strengths	- Dukungan regulasi daerah yang kuat.- Infrastruktur organisasi yang lengkap dan terstruktur.- Kerja sama aktif dengan berbagai mitra.
Weaknesses	- Terbatasnya SDM dengan kapasitas digital tinggi.- Rendahnya literasi teknologi sebagian pelaku UMKM.- Keterbatasan anggaran legiatan.
Opportunities	- Adanya program nasional digitalisasi UMKM.- Pemasok pasar digital yang terus berkembang.- Kolaborasi dengan kementerian nasional dan internasional.
Threats	- Perantangan produk utama luar daerah yang masuk ke Sidoarjo.- Tidaknya element digitalisasi.- Ketidipertanian dalam melakukan antara pelaku UMKM.

Sumber: Data Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sidoarjo

Untuk menganalisis bagaimana peran dinas ini dijalankan secara konkret, digunakan teori peran pemerintah menurut Yusuf (2014). Yusuf membagi peran pemerintah dalam tiga bentuk utama: (1) regulator, yaitu sebagai pihak yang mengatur dan memastikan kepatuhan terhadap hukum dan kebijakan; (2) fasilitator, yaitu sebagai pihak yang memberikan kemudahan, sumber daya, dan dukungan terhadap pelaku usaha; dan (3) dinamisator, yaitu sebagai pihak yang mendorong partisipasi aktif masyarakat melalui pembinaan, edukasi, dan motivasi kewirausahaan.

Dalam subbab ini, penjabaran peran tersebut diuraikan berdasarkan temuan lapangan yang diperoleh melalui wawancara mendalam dengan Bapak Evan, salah satu pejabat fungsional di Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sidoarjo, yang menjelaskan secara rinci bagaimana dinas berkontribusi dalam menyukseskan pelaksanaan e-katalog lokal UMKM.

1. Peran Dinas sebagai Regulator

Sebagai regulator, Dinas Koperasi dan Usaha Mikro memiliki tanggung jawab untuk menjaga agar pelaksanaan e-katalog lokal UMKM di Kabupaten Sidoarjo berlangsung sesuai dengan ketentuan dan norma hukum yang berlaku. Menurut Yusuf (2014), peran regulator pemerintah adalah memastikan bahwa aktivitas ekonomi dan sosial masyarakat tidak menyimpang dari kebijakan publik dan peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini, dinas berperan sebagai penerjemah

kebijakan nasional ke dalam bentuk teknis yang dapat dilaksanakan secara lokal. Hasil wawancara menunjukkan bahwa dinas tidak secara langsung membuat regulasi baru, tetapi mengadopsi dan menyesuaikan kebijakan pusat dalam konteks daerah. Beberapa bentuk implementasi peran regulator oleh dinas antara lain:

- a) Menyampaikan edaran kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) agar memprioritaskan penggunaan produk UMKM lokal melalui e-katalog (Bapak Evan, wawancara, 15 Mei 2025).
- b) Melakukan verifikasi kelayakan produk UMKM, mulai dari legalitas usaha, kualitas produk, hingga kelengkapan dokumen seperti NIB dan sertifikasi lainnya.
- c) Menjalankan fungsi monitoring dan evaluasi internal, termasuk melakukan klasifikasi terhadap UMKM yang aktif dan yang pasif, untuk memastikan bahwa hanya pelaku usaha yang kompeten yang direkomendasikan ke dalam sistem e-katalog.

Melalui fungsi-fungsi ini, Dinas Koperasi dan Usaha Mikro menjalankan peran pengaturan secara proaktif, tidak hanya sebagai pelaksana teknis, tetapi sebagai penjaga agar implementasi e-katalog lokal UMKM benar-benar berpihak pada penguatan ekonomi daerah.

2. Peran Dinas sebagai Fasilitator

Menurut Yusuf (2014), peran fasilitator adalah bentuk keterlibatan pemerintah sebagai penghubung yang menjembatani kebutuhan masyarakat dengan akses terhadap sumber daya, teknologi, dan sistem yang diperlukan. Dalam konteks e-katalog lokal, dinas tidak hanya mengatur, tetapi juga memberikan pendampingan teknis dan administratif kepada pelaku UMKM agar mampu beradaptasi dengan sistem digital tersebut. Berdasarkan hasil wawancara, ditemukan bahwa sebagian besar UMKM, terutama yang baru, mengalami kendala dalam memahami sistem pengadaan digital, termasuk cara pendaftaran akun, proses unggah produk, serta pengisian harga dan kelengkapan dokumen. Untuk mengatasi hal ini, dinas menjalankan beberapa bentuk fasilitasi:

- a) Menyelenggarakan pelatihan teknis secara berkala mengenai penggunaan aplikasi e-katalog (Bapak Evan, wawancara, 15 Mei 2025).
- b) Memberikan pendampingan langsung melalui petugas dinas, terutama kepada UMKM yang belum familiar dengan perangkat teknologi informasi.
- c) Membantu proses pembuatan akun secara kolektif, guna efisiensi waktu dan sumber daya.
- d) Memfasilitasi pengurusan legalitas, seperti NIB, PIRT, dan sertifikat halal, yang merupakan syarat utama untuk dapat terdaftar di e-katalog.

Fasilitasi ini menjadi sangat penting karena sistem e-katalog mengharuskan pelaku UMKM untuk memiliki kompetensi digital dan administrasi yang cukup tinggi, yang tidak semua pelaku usaha memilikinya. Oleh karena itu, dinas hadir sebagai perantara antara sistem pemerintah pusat dan kesiapan lokal di level UMKM.

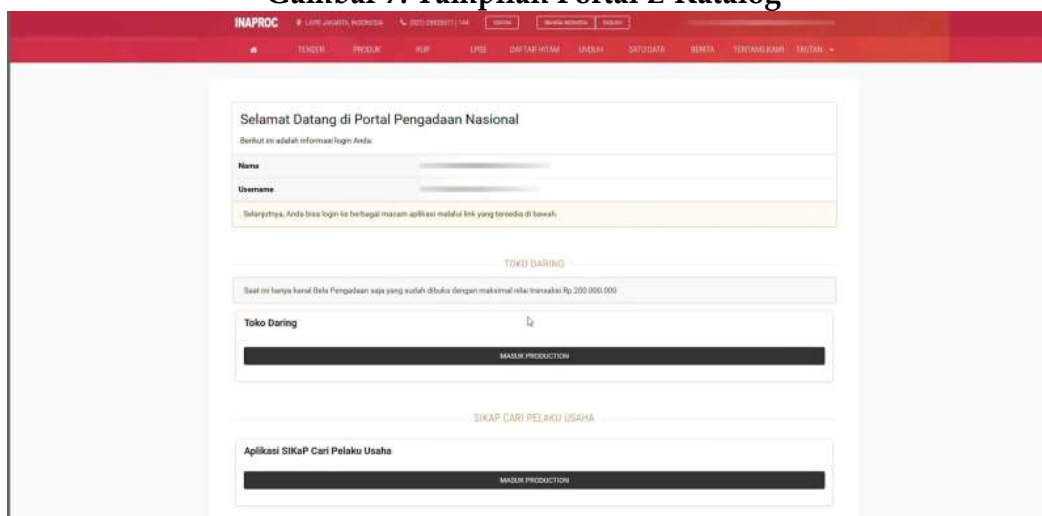
3. Peran Dinas sebagai Dinamisator

Sebagai dinamisator, pemerintah berperan dalam membangkitkan, menggerakkan, dan mendorong masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam

pembangunan ekonomi. Yusuf (2014) menekankan bahwa peran ini sangat penting dalam menciptakan kesadaran, semangat, dan kemandirian di tengah masyarakat. Hasil wawancara dengan Bapak Evan mengungkapkan bahwa salah satu tantangan utama dalam pelaksanaan e-katalog adalah masih rendahnya kesadaran dan pemahaman pelaku UMKM mengenai potensi pasar yang tersedia dalam sistem ini. Banyak pelaku usaha beranggapan bahwa dengan hanya mendaftar di e-katalog, produk mereka akan otomatis dibeli oleh instansi pemerintah, padahal faktanya proses tersebut tetap memerlukan proaktifitas, promosi, dan konsistensi dalam menjaga kualitas (Bapak Evan, wawancara, 15 Mei 2025). Untuk mengubah pola pikir pasif tersebut, dinas menjalankan berbagai kegiatan edukatif, seperti:

- a) Memberikan edukasi tentang pentingnya daya saing dan kualitas produk dalam lingkungan pengadaan pemerintah.
- b) Mendorong pelaku UMKM untuk mengembangkan inovasi produk dan layanan purna jual.
- c) Membentuk pola pikir mandiri dan aktif melalui program pembinaan kewirausahaan digital dan penguatan jejaring usaha.
- d) Mengimbuu UMKM untuk tidak hanya bergantung pada katalog, tetapi juga mengembangkan pemasaran digital secara mandiri, seperti melalui media sosial atau marketplace.

Gambar 7. Tampilan Portal E-Katalog



Sumber: Web E-Katalog Kabupaten Sidoarjo

Dengan demikian, dinas tidak hanya mengatur dan memfasilitasi, tetapi juga mendorong perubahan budaya usaha, dari yang semula bergantung pada bantuan pemerintah menjadi pelaku usaha yang inovatif, kompetitif, dan adaptif terhadap perubahan. Peran Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sidoarjo dalam pelaksanaan e-katalog lokal UMKM secara nyata mencerminkan tiga fungsi utama peran pemerintah sebagaimana dirumuskan oleh Yusuf (2014), yakni sebagai regulator, fasilitator, dan dinamisator. Ketiga peran ini dijalankan secara simultan dan saling melengkapi. Sebagai regulator, dinas menjaga kepatuhan dan seleksi UMKM yang layak; sebagai fasilitator, dinas menyediakan dukungan teknis dan administratif; dan sebagai dinamisator, dinas membangkitkan motivasi dan kemandirian pelaku usaha. Analisis ini menunjukkan bahwa keberhasilan e-katalog

lokal tidak hanya ditentukan oleh sistem digital yang tersedia, tetapi juga oleh kualitas intervensi aktor pemerintah daerah dalam mendampingi dan mengarahkan pelaku UMKM secara berkelanjutan.

2. Strategi dan Pendampingan UMKM

Implementasi kebijakan e-katalog lokal yang melibatkan UMKM sebagai penyedia barang dan jasa pemerintah menuntut peran aktif pemerintah daerah, terutama dalam menyosialisasikan kebijakan serta mendampingi UMKM di setiap tahapannya. Karena masih banyak pelaku UMKM yang belum memiliki kesiapan digital dan pemahaman memadai, keberhasilan program ini sangat bergantung pada efektivitas strategi sosialisasi dan pendampingan. Sosialisasi berperan penting dalam membangun kesadaran dan pemahaman teknis pelaku usaha, sementara pendampingan memastikan mereka mendapatkan bantuan berkelanjutan agar tidak hanya mendaftar, tetapi juga aktif dan konsisten menggunakan platform e-katalog secara optimal. Berdasarkan hasil wawancara mendalam dengan Bapak Evan dari Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sidoarjo, diperoleh sejumlah strategi konkret yang dijalankan dinas dalam rangka sosialisasi dan pendampingan UMKM selama pelaksanaan e-katalog lokal. Strategi-strategi tersebut diuraikan sebagai berikut:

Sosialisasi melalui Penguatan Informasi Langsung kepada UMKM

Strategi awal yang diterapkan oleh dinas adalah melaksanakan sosialisasi langsung kepada pelaku UMKM. Dalam pelaksanaannya, dinas menyoar para pelaku usaha binaan yang telah memiliki legalitas dasar seperti Nomor Induk Berusaha (NIB) dan sertifikasi PIRT. Menurut Bapak Evan, kegiatan ini dilaksanakan secara tatap muka melalui pertemuan kelompok UMKM di kecamatan-kecamatan, atau saat pelatihan rutin yang memang sudah diagendakan oleh dinas.

Dinas menyampaikan edaran dan informasi resmi mengenai manfaat e-katalog lokal, peluang peningkatan omzet, dan cara akses platform tersebut. Sosialisasi ini dilakukan dengan pendekatan yang persuasif dan komunikatif, bukan hanya bersifat administratif. Bapak Evan menyatakan bahwa banyak pelaku UMKM yang awalnya merasa bingung atau ragu karena kurang familiar dengan istilah-istilah seperti LPSE, SiKAP, maupun SPSE. Karena itu, penyampaian materi dilakukan dengan bahasa yang sederhana dan mudah dipahami.

“Kita sampaikan dengan bahasa yang ringan dulu. Misalnya, kita jelaskan bahwa e-katalog itu seperti marketplace, tapi khusus untuk pembelian pemerintah. Jadi pelaku usaha itu tidak merasa terlalu rumit dulu, baru setelah itu kita jelaskan tahap-tahap teknisnya.” (Bapak Evan, wawancara, 15 Mei 2025).

Gambar 8. Surat Sosialisasi E-Katalog



Sumber: Surat E-Katalog Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo

Menurut hasil wawancara yang dilakukan dengan salah satu UMKM di Kabupaten Sidoarjo yakni Ibu Wiwin selaku pemilik usaha bandeng mamama mengatakan bahwa beliau telah mengetahui dan pernah menerima sosialisasi terkait dengan keberadaan E-Katalog. Dalam wawancaranya beliau mengatakan “Saya tahu itu karena dulu sempat ada penjelasan dari dinas mbak terkait E-Katalog, jadi bisa dibilang semacam sosialisasi juga.” (Ibu Wiwin, Wawancara 19 Mei 2025).

Gambar 9. Wawancara bersama Ibu Wiwin



Sumber: Dokumentasi Pribadi

Kemudian pengakuan lain oleh bapak Ainur Budi selaku UMKM pemilik toko bahan pokok, mengatakan bahwa beliau mengetahui adanya E-Katalog namun kurang mengetahui lebih dalam terkait bagaimana penggunaan platform tersebut. Dalam wawancaranya beliau mengatakan “kalau soal E-Katalog saya cuma sekedar tahu saja dan pernah dengar, tapi untuk yang lainnya seperti gimana pakainya saya kurang tahu.” (Bapak Ainur Budi, Wawancara 19 Mei 2025).

Gambar 10. Wawancara bersama Bapak Ainur Budi



Sumber: Dokumentasi Pribadi

Pendampingan Teknis dalam Proses Pendaftaran dan Pengunggahan Produk

Strategi berikutnya adalah pelaksanaan pendampingan langsung yang bersifat teknis, yang menasar pelaku UMKM yang sudah menyatakan minat untuk bergabung ke dalam sistem e-katalog. Menurut Bapak Evan, banyak UMKM yang terkendala saat proses input data dan pengunggahan produk ke dalam sistem e-katalog, terutama karena tidak terbiasa menggunakan perangkat komputer, dokumen digital, atau platform pemerintah seperti SiKAP dan LPSE.

Untuk menjawab kendala ini, dinas menyediakan pendampingan secara berjenjang dan berkelompok. Dalam satu sesi, petugas dinas bisa mendampingi 10-15 UMKM sekaligus. UMKM didampingi saat membuat akun, login ke sistem, melengkapi informasi usaha, mengunggah foto produk, serta mengisi harga dan deskripsi. Jika ditemukan kendala teknis, petugas akan membantu secara langsung di tempat.

“Kita biasanya dampingi sampai berhasil. Misal ada yang kesulitan upload, kita bantu. Kadang kendalanya sinyal, kadang juga karena belum punya email aktif. Hal-hal kayak gini kecil tapi penting.” (Bapak Evan, wawancara, 15 Mei 2025).

Pendampingan juga mencakup bimbingan pengurusan legalitas tambahan, seperti pengajuan sertifikat halal, PIRT, hingga bantuan pengurusan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Semua hal ini dibutuhkan agar pelaku UMKM bisa memenuhi syarat administrasi untuk masuk dalam sistem pengadaan pemerintah.

Gambar 11. Panduan Surat Keterangan dan Pelatihan E-Katalog



Sumber : Website Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sidoarjo

Pembuatan Grup WhatsApp sebagai Media Komunikasi dan Layanan Cepat

Salah satu inovasi yang digunakan dalam strategi pendampingan adalah pemanfaatan grup WhatsApp sebagai sarana komunikasi, edukasi, dan respon cepat terhadap kendala yang dihadapi UMKM. Dinas membuat grup khusus yang berisi pelaku UMKM peserta e-katalog lokal serta petugas pendamping dari dinas. Grup ini digunakan untuk berbagi informasi terbaru, mengingatkan jadwal pelatihan, dan memberikan bantuan jika ada UMKM yang mengalami kendala teknis saat menggunakan aplikasi.

Media ini terbukti efektif karena lebih cepat, fleksibel, dan interaktif dibandingkan komunikasi formal. UMKM dapat mengirim tangkapan layar (screenshot) kendala mereka, dan petugas akan memberikan instruksi atau langsung mengarahkan melalui video call.

“WhatsApp itu jadi pusat komunikasi kita sekarang. UMKM bisa tanya kapan saja, dan biasanya kita respon langsung. Ini penting supaya mereka merasa tidak sendirian dan selalu ada yang bantu.” (Bapak Evan, wawancara, 15 Mei 2025).

Strategi Bertahap Berdasarkan Klasifikasi UMKM

Dinas juga menerapkan strategi pendampingan yang bertahap berdasarkan segmentasi kesiapan UMKM. Tidak semua pelaku usaha langsung diarahkan ke e-katalog. Mereka yang belum memiliki legalitas atau belum siap digital akan diarahkan untuk mengikuti pelatihan-pelatihan dasar terlebih dahulu. Hanya UMKM yang sudah memenuhi kriteria kelayakan (legalitas lengkap, produk sesuai standar, dan kesiapan teknis) yang diarahkan ke proses pendaftaran e-katalog.

Pendekatan ini membantu efisiensi tenaga pendamping, serta memastikan bahwa UMKM yang masuk dalam sistem e-katalog adalah mereka yang memang siap bersaing dan mampu memenuhi permintaan dari instansi.

“Kami seleksi dulu. Ada UMKM yang memang sudah aktif, mereka kita masukkan duluan ke e-katalog. Yang lain kita latih dulu supaya nggak kaget dan akhirnya mandek di tengah jalan.” (Bapak Evan, wawancara, 15 Mei 2025).

Gambar 12. Kegiatan Sosialisasi E-Katalog



Sumber : Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sidoarjo

Strategi sosialisasi dan pendampingan yang dijalankan oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sidoarjo merupakan upaya sistematis dan berjenjang untuk memastikan keberhasilan implementasi e-katalog lokal. Melalui penyampaian informasi secara langsung, pendampingan teknis, pemanfaatan media komunikasi cepat seperti WhatsApp, serta strategi klasifikasi UMKM berdasarkan kesiapan mereka, dinas mampu menghadirkan pendekatan yang adaptif terhadap kondisi riil pelaku usaha di lapangan.

Pendekatan ini tidak hanya membangun pemahaman UMKM terhadap sistem e-katalog, tetapi juga membentuk hubungan kepercayaan antara pelaku usaha dan pemerintah, sehingga menciptakan ekosistem digital yang inklusif, responsif, dan berkelanjutan.

3. *Evaluasi Pelaksanaan dan Efektivitas Program*

Pelaksanaan program digitalisasi UMKM melalui E-Katalog Lokal oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sidoarjo merupakan sebuah upaya strategis dalam memperluas akses pasar UMKM dan meningkatkan efisiensi pengadaan barang dan jasa pemerintah. Namun, hasil wawancara dengan narasumber dari dinas terkait dan pelaku UMKM menunjukkan bahwa pelaksanaan program ini masih menghadapi sejumlah kendala dan tantangan yang mempengaruhi efektivitas dan dampak yang diharapkan.

Dari sisi pemerintah daerah, peran utama yang dijalankan masih terfokus pada aspek regulasi dan fasilitasi, seperti yang dikemukakan oleh Soekanto (2014) dalam teori peran pemerintah. Bapak Evan, narasumber dari Dinas Koperasi, menyampaikan bahwa program sudah disosialisasikan secara berkala, dan pelatihan-pelatihan sudah diupayakan untuk meningkatkan kemampuan pelaku UMKM dalam memanfaatkan E-Katalog. Namun, jangkauan pelatihan dan sosialisasi masih terbatas dan belum menjangkau seluruh UMKM secara menyeluruh. "Kami sudah melakukan pelatihan bersama LKPP dan sosialisasi teknis, tapi belum semua UMKM bisa kami jangkau secara optimal," ungkapnya.

Pernyataan tersebut mengindikasikan bahwa peran pemerintah sebagai dinamisator yang seharusnya menginisiasi dan mendorong perubahan perilaku dan inovasi UMKM belum maksimal. Namun terlihat bahwa perkembangan jumlah produk UMKM dari tahun ke tahun selalu meningkat. Meningkatnya produk UMKM ini belum optimal dan signifikan dikarenakan proses pendampingan yang berkelanjutan juga belum dijalankan secara sistematis sehingga pelaku UMKM sering merasa kurang mendapatkan dukungan penuh. Hal ini berimbas pada tingkat partisipasi UMKM yang masih rendah dan tingkat pemahaman yang belum merata terhadap pentingnya digitalisasi usaha.

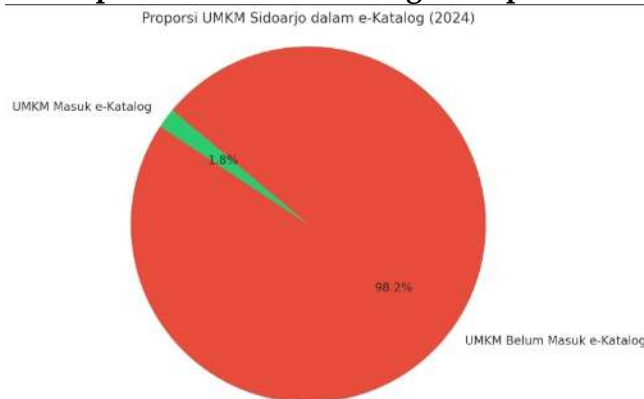
Gambar 13. Perkembangan Jumlah Produk E-Katalog Kabupaten Sidoarjo



Sumber : Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sidoarjo

Beralih ke perspektif pelaku UMKM, banyak dari mereka yang belum memahami prosedur pendaftaran dan manfaat bergabung dalam E-Katalog. Salah seorang pelaku UMKM makanan ringan mengungkapkan, “Saya belum ikut pelatihan soal E-Katalog, katanya ribet urusannya, harus punya NIB, sertifikat, lalu harus upload produk. Saya belum paham semua itu.” Pernyataan ini menunjukkan adanya gap pengetahuan dan keterampilan digital yang menjadi hambatan utama dalam penerapan digitalisasi. Ini sesuai dengan prinsip pemberdayaan menurut Ife dan Tesoriero (2008), yang menekankan bahwa pemberdayaan harus dimulai dari penguatan kapasitas dan partisipasi aktif masyarakat, bukan sekadar memberikan akses tanpa pendampingan.

Gambar 14. Proporsi UMKM E-Katalog Kabupaten Sidoarjo



Sumber : Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sidoarjo

Kondisi ini diperparah dengan ketidakterpaduan sistem antar instansi pemerintah, yang menurut narasumber dinas masih menjadi kendala utama dalam verifikasi dan validasi data UMKM. “Sudah ada beberapa UMKM yang daftar, tapi verifikasi dari pusat sering tertunda karena belum sinkron dengan dinas pengadaan” jelas Bapak Evan. Fragmentasi sistem ini memperlambat proses integrasi digital yang menjadi salah satu pilar transformasi digital menurut Tassabehji (2016). Transformasi

digital yang sukses harus meliputi perubahan menyeluruh pada sistem, proses, dan budaya kerja, bukan hanya pengenalan teknologi baru secara parsial.

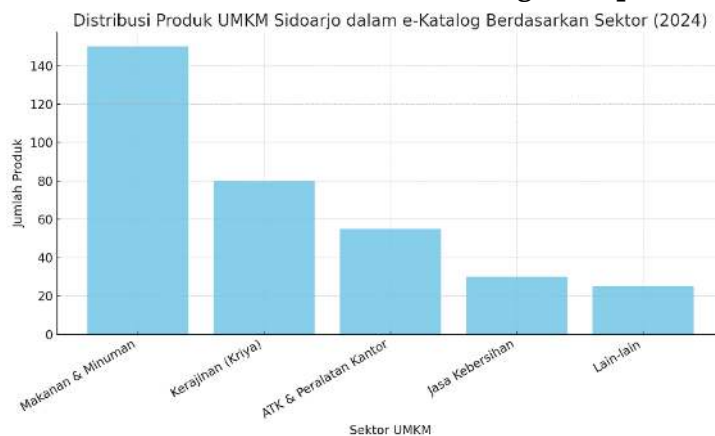
Selain itu, dari sisi budaya kerja UMKM, banyak pelaku yang masih nyaman dengan cara tradisional dan belum melihat nilai tambah yang jelas dari digitalisasi. Salah satu pelaku mengatakan, "Saya lebih suka jual langsung ke pelanggan, tanpa harus ribet urus E-Katalog. Lebih cepat muter uangnya." Kondisi ini mencerminkan tantangan besar dalam membangun digital mindset yang menjadi salah satu aspek penting dalam transformasi digital, yakni perubahan sikap dan perilaku pengguna teknologi agar mau beradaptasi dengan sistem baru.

Aspek pemberdayaan juga terlihat belum berjalan secara optimal. Beberapa UMKM merasa mereka hanya menjadi objek pelatihan tanpa adanya tindak lanjut dan pendampingan berkelanjutan. "Saya ikut pelatihan sekali, tapi setelah itu tidak ada kabar lagi, hanya diminta menunggu," ujar salah satu pelaku. Ini bertentangan dengan prinsip pemberdayaan yang menuntut adanya kesinambungan dalam pengembangan kapasitas sehingga UMKM dapat berdiri mandiri dan mampu mengelola usaha secara profesional dan digital.

Di sisi lain, potensi UMKM untuk berpartisipasi dalam sistem digital sebenarnya cukup tinggi apabila diberikan pendampingan yang tepat dan sistem yang tidak rumit. Salah satu pelaku mengungkapkan, "Kalau ada pendampingan terus menerus dan sistemnya mudah, saya mau daftar karena katanya bisa ikut pengadaan pemerintah dan peluangnya lebih besar." Hal ini menandakan bahwa peran dinamisator pemerintah harus diperkuat agar dapat memberikan motivasi, edukasi, dan dukungan secara intensif sehingga UMKM benar-benar diberdayakan.

Lebih lanjut, keterbatasan sumber daya manusia di dinas dan keterbatasan anggaran juga menjadi faktor penghambat dalam pelaksanaan program digitalisasi. Narasumber menyatakan bahwa data UMKM yang ada belum terintegrasi secara baik dan pelaksanaan pelatihan masih bergantung pada kesempatan kerja sama dengan pihak ketiga. Hal ini menimbulkan kesan bahwa program digitalisasi belum menjadi prioritas penuh sehingga belum diterapkan secara menyeluruh dan berkesinambungan.

Gambar 15. Distribusi Produk UMKM E-Katalog Kabupaten Sidoarjo



Sumber : Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sidoarjo

Secara keseluruhan, evaluasi pelaksanaan program E-Katalog Lokal ini memperlihatkan bahwa meskipun sudah ada langkah awal dalam digitalisasi

UMKM, terdapat kesenjangan antara tujuan strategis program dengan realitas di lapangan. Pemerintah belum menjalankan peran dinamisator secara optimal, pemberdayaan pelaku UMKM masih sebatas tahap awal tanpa keberlanjutan, dan transformasi digital yang diharapkan belum terjadi secara menyeluruh baik dari sisi sistem, proses, maupun budaya kerja.

Untuk memperbaiki kondisi ini, perlu adanya penguatan fungsi pemerintah dalam memberikan pendampingan berkelanjutan, memperbaiki integrasi data antar instansi, serta membangun budaya digital yang inklusif dan mudah diakses oleh seluruh UMKM. Pendekatan yang lebih humanis dan partisipatif dalam pemberdayaan UMKM akan meningkatkan keterlibatan dan kesiapan mereka menghadapi era digital. Selain itu, pemerintah juga perlu mengedepankan inovasi dalam metode pelatihan dan sosialisasi agar lebih menarik dan relevan dengan kebutuhan UMKM.

Dengan perbaikan tersebut, diharapkan transformasi digital dapat berjalan secara efektif sehingga dapat mengangkat UMKM dari usaha tradisional menjadi usaha yang modern, produktif, dan berdaya saing tinggi, sesuai dengan tujuan pembangunan ekonomi daerah dan nasional.

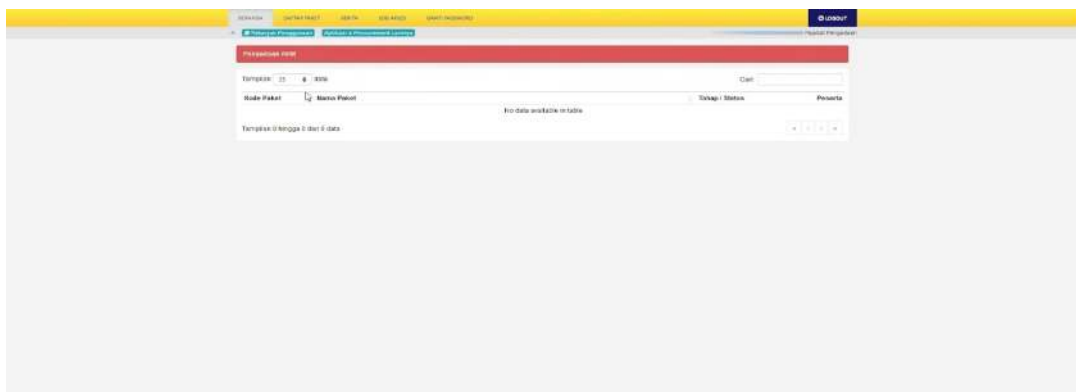
4. Hambatan Internal dan Eksternal

Pelaksanaan program digitalisasi UMKM melalui E-Katalog yang digagas oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sidoarjo menghadapi berbagai hambatan signifikan yang berasal dari aspek internal dinas maupun dari pelaku UMKM itu sendiri. Hambatan internal yang dialami Dinas Koperasi terutama berkaitan dengan keterbatasan sumber daya manusia yang kompeten dalam bidang teknologi informasi dan digitalisasi. Berdasarkan hasil wawancara, narasumber dari pelaku UMKM mengungkapkan bahwa untuk dapat menjadi pelatih (trainer) yang efektif dalam proses digitalisasi UMKM, diperlukan penguasaan aplikasi dan teknologi yang memadai. Narasumber menyatakan, "Kalau mau jadi trainernya saya itu atau saya mungkin bisa kerjasama sama pihak lain itu saya harus punya aplikasi yang berlaku ya terpaksa kita kan harus mengikuti" (Ibu Amri, Wawancara, 15 Mei 2025). Hal ini memperlihatkan bahwa staf Dinas masih dalam proses peningkatan kapasitas teknis, dan belum seluruhnya siap mengelola atau mengoperasikan aplikasi E-Katalog secara optimal. Keterbatasan kompetensi ini berimplikasi pada efektivitas pelatihan yang diberikan kepada pelaku UMKM, yang pada akhirnya menghambat keberhasilan digitalisasi produk UMKM.

Selain faktor SDM, aspek anggaran dan infrastruktur teknologi juga menjadi hambatan internal penting yang mempengaruhi pelaksanaan program. Dinas Koperasi masih menghadapi tantangan dalam menyediakan fasilitas teknologi yang memadai dan menyebarkan akses digital secara luas ke seluruh wilayah kecamatan. Narasumber menyebutkan bahwa pelatihan dan pendampingan masih bersifat terbatas dan belum menjangkau seluruh pelaku UMKM yang ada. Ini menunjukkan bahwa peran pemerintah sebagai fasilitator dan regulator yang diamanatkan oleh teori peran pemerintah (Soerjono Soekanto & Yusuf, 2014) belum dapat terlaksana secara optimal. Teori ini menekankan pentingnya pemerintah memberikan fasilitasi, regulasi, serta dukungan yang komprehensif agar UMKM dapat bertransformasi secara digital dan berdaya saing. Namun, kondisi di lapangan menunjukkan bahwa

dukungan tersebut masih kurang merata dan terkendala oleh faktor internal di Dinas sendiri.

Gambar 16. Tampilan Laman Produk E-Katalog



Sumber : Web E-Katalog Kabupaten Sidoarjo

Dari sisi pelaku UMKM, hambatan yang muncul bersifat eksternal dan cukup kompleks. Wawancara dengan pelaku UMKM mengungkapkan bahwa banyak UMKM masih bergantung pada mekanisme pemasaran tradisional dan belum mengenal atau menggunakan platform digital secara serius. Salah satu pelaku UMKM menyampaikan, “Enggak tau, ya cuman jual di sini aja ya enggak ada online aja atau lewat-lewat gitu...” (Bapak Edy, Wawancara, 15 Mei 2025). Ungkapan ini menunjukkan bahwa pelaku usaha UMKM masih terbiasa dengan penjualan offline, di pasar-pasar tradisional seperti Pasar Pabean Surabaya dan sekitarnya, tanpa melakukan penjualan melalui marketplace digital atau katalog online. Hambatan ini sangat berkaitan dengan rendahnya literasi digital dan kurangnya motivasi untuk beralih ke sistem digitalisasi produk.

Lebih jauh, ada kendala teknis dalam akses dan penggunaan aplikasi E-Katalog yang disediakan. Salah seorang pelaku UMKM juga menyebutkan, “Sejauh ini belum gabung sama online itu aku...” (Ibu Ani, Wawancara, 15 Mei 2025). Pernyataan ini menunjukkan bahwa belum semua UMKM terintegrasi ke dalam platform digital secara merata. Selain itu beberapa UMKM juga lebih memilih untuk menggunakan platform digital lain untuk memasarkan dan menjual produk mereka. Hasil Wawancara dengan Ibu Wiwin mengatakan “kalau untuk menjual produk saya tidak pakai e-katalog, jadi saya pakai platform lain seperti Shopee atau menerima orderan via WhatsApp saja” (Ibu Wiwin, Wawancara 19 Mei 2025). Hal ini tentu saja berpengaruh pada rendahnya partisipasi UMKM dalam program digitalisasi yang digagas oleh pemerintah daerah. Sesuai teori pemberdayaan UMKM yang dikembangkan oleh Ife & Tesoriero, pemberdayaan tidak hanya mengacu pada pemberian akses teknologi saja, melainkan juga harus diikuti dengan peningkatan kapasitas dan partisipasi aktif pelaku usaha (Ife & Tesoriero, 2006). Dalam hal ini, meskipun pemerintah telah menyediakan platform digital seperti E-Katalog, upaya pemberdayaan UMKM melalui pelatihan dan pendampingan teknis masih perlu diperkuat agar pelaku usaha benar-benar mampu menggunakan teknologi secara efektif.

Selain itu, hambatan yang cukup signifikan juga muncul dari kurangnya tindak lanjut dan pendampingan berkelanjutan pasca pelatihan awal. Banyak pelaku

UMKM yang merasa kesulitan untuk melanjutkan proses digitalisasi karena minimnya pendampingan yang kontinu. Kondisi ini menyebabkan motivasi untuk beradaptasi dengan teknologi digital menjadi menurun dan berdampak pada lambatnya proses integrasi UMKM ke platform digital. Fenomena ini memperlihatkan bahwa pemberdayaan yang bersifat insidental dan tidak berkelanjutan kurang mampu mendorong perubahan signifikan dalam perilaku pelaku UMKM.

Hambatan internal dari Dinas Koperasi juga mencakup aspek transformasi digital yang masih dalam tahap awal. Transformasi digital tidak hanya berkaitan dengan penggunaan teknologi, tetapi juga harus menyentuh perubahan budaya organisasi, pola kerja, serta filosofi pelayanan publik yang modern dan responsif (Tassabehji, 2016).

Gambar 17. Pembaruan Kebijakan Versi E-Katalog

Pembaruan Kebijakan Privasi

Kami sedang memperbarui **Kebijakan Privasi** yang akan berlaku pada 2 Juni 2025. Pembaruan utama meliputi:

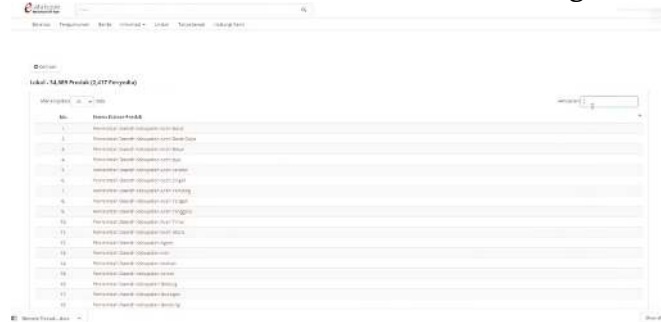
- Detail selengkapnya tentang cara kami memproses dan membagikan informasi Anda untuk fitur belanja kami
- Informasi selengkapnya tentang berbagi analitik dan laporan dengan mitra, penjual, dan pengiklan
- Penggunaan baru informasi Anda untuk menampilkan iklan yang dipersonalisasi dari pengiklan di situs dan aplikasi lain, termasuk penggunaan data untuk mengoperasikan layanan jaringan iklan

Sumber : Web Laman E-Katalog Kabupaten Sidoarjo

Dalam konteks Dinas Koperasi, transformasi digital masih terbatas pada pelaksanaan program secara manual dan kurang terintegrasi secara digital penuh. Misalnya, pendampingan dan pelatihan masih dilakukan secara tatap muka dan belum sepenuhnya menggunakan platform digital untuk monitoring atau pengelolaan data UMKM. Hal ini menunjukkan bahwa Dinas masih berada dalam tahap adaptasi awal terhadap transformasi digital dan belum mampu mengoptimalkan potensi teknologi untuk mempercepat proses pemberdayaan UMKM. Selain itu, pada pelaksanaan secara nyata dari pelaku UMKM sendiri dalam relevansinya dengan transformasi digital ini dapat dinyatakan pada penerapan penginputan barang yang akan dijual melalui platform jual beli online, seperti Shopee. Hal ini karena pelaku usaha mengalami kesulitan dan merasa jika menggunakan promosi jual beli melalui Shopee ini terlalu rumit. Pada saat menentukan harga barang yang akan dijual pun merasa sedikit membingungkan.

Sehingga, pada penerapan transformasi digital sendiri dianggap masih belum optimal. (Hasil Wawancara tanggal 19 Mei 2025)

Gambar 18. Data Lokal Produk E-Katalog



Sumber : Web Laman E-Katalog Kabupaten Sidoarjo

Secara keseluruhan, hambatan yang dihadapi baik dari sisi internal Dinas maupun eksternal pelaku UMKM menunjukkan bahwa proses digitalisasi melalui E-Katalog UMKM di Kabupaten Sidoarjo masih memerlukan perhatian khusus. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia di Dinas, perbaikan infrastruktur teknologi, pengembangan pelatihan yang lebih teknis dan mendalam, serta perubahan budaya kerja yang mendukung digitalisasi menjadi sangat penting untuk mempercepat dan memperluas jangkauan program ini. Pendekatan pemberdayaan yang komprehensif dan transformasi digital yang berkelanjutan akan menjadi kunci utama agar program ini tidak hanya menjadi formalitas, melainkan benar-benar mampu meningkatkan daya saing UMKM secara nyata di era digital.

5. Inovasi dan Upaya Perluasan Akses UMKM ke e-Katalog

Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sidoarjo terus melakukan berbagai upaya inovatif guna memperluas akses pelaku UMKM terhadap sistem e-Katalog lokal. Dalam wawancara dengan Bapak Evan selaku narasumber dari Dinas, dijelaskan bahwa strategi utama saat ini adalah melalui pelatihan teknis langsung yang menyasar UMKM binaan maupun non binaan. Program ini tidak sekadar sosialisasi, tetapi lebih bersifat praktis, di mana pelaku UMKM diajarkan cara mendaftar, mengunggah produk, serta melakukan klasifikasi barang sesuai standar LKPP.

Gambar 19. Panduan Pengurusan Surat NIB UMKM



Sumber : Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sidoarjo

Namun, dari sisi lapangan, realitasnya tidak sesederhana itu. Sebagaimana disampaikan oleh salah satu pelaku UMKM dalam wawancara, mereka mengaku bahwa upaya branding dan pemasaran masih banyak dilakukan secara konvensional. "Jalan-jalan branding-branding dari pihak lain... orang kan beli mahal-mahal kan harus tahu barangnya sudah mengenal... turis atau enggak sudah kenal produk kami belum..." (Ibu Amri, Wawancara, 15 Mei 2025).

Pernyataan ini mencerminkan bahwa sebagian UMKM masih sangat bergantung pada model komunikasi luring, promosi fisik, serta jejaring perorangan ketimbang kanal digital seperti e-Katalog. Ini menandakan bahwa kendala bukan hanya teknis, tetapi juga pada aspek digital trust dan kebiasaan pasar.

Menurut teori Transformasi Digital oleh Rogers (2016), adopsi teknologi tidak cukup hanya dengan menyediakan platform digital, tetapi juga membutuhkan kesiapan sosial, pengetahuan pengguna, serta dukungan kelembagaan. Dinas menanggapi hal ini dengan menginisiasi bentuk pelatihan-pelatihan kolaboratif bersama perguruan tinggi dan lembaga pendidikan vokasi, termasuk dengan sekolah-sekolah kejuruan. Pendekatan ini menunjukkan bahwa transformasi digital UMKM di Sidoarjo mengarah pada kolaborasi lintas-sektor dan pemberdayaan berbasis komunitas lokal. Upaya mengaitkan pelatihan teknis dengan institusi pendidikan merupakan bentuk inovasi struktural yang memperluas ruang pembelajaran digital bagi UMKM.

Dari perspektif teori Peran, Dinas memiliki posisi sebagai aktor utama yang menjembatani kebijakan pusat (LKPP dan Kemenkop) dengan konteks lokal. Peran ini tidak semata administratif, tetapi juga edukatif dan akomodatif terhadap dinamika lokal. Seperti disebutkan narasumber dinas "Kami datang satu-satu, tidak semua UMKM itu paham IT. Makanya kami pakai pendekatan mikro, ya semacam pendampingan..." (Bapak Sigit, Wawancara, 15 Mei 2025).

Pernyataan ini menegaskan bahwa dinas bukan hanya menjalankan mandat, tetapi juga memainkan fungsi advokasi dan adaptasi. Dalam teori organisasi publik, peran seperti ini disebut sebagai peran aktif katalisator, di mana institusi mampu menginisiasi dan merespons kebutuhan riil di lapangan.

Sementara dari sudut pandang teori Pemberdayaan menurut Ife & Tesoriero (2006), inovasi yang dilakukan mencakup upaya pelibatan aktif UMKM dalam proses pengambilan keputusan terkait kegiatan, desain pelatihan, dan tindak lanjutnya. Pelaku UMKM memiliki inisiatif internal yang tumbuh dari proses pelatihan dan motivasi. Artinya, program-program dinas telah memunculkan efek pemberdayaan, bukan hanya pasif menerima bantuan. Pemberdayaan dalam hal ini mencakup dimensi kemampuan teknis, semangat kewirausahaan keluarga, serta dorongan untuk berkembang secara mandiri.

Gambar 20. Panduan Pengurusan NIB UMKM



Sumber : Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sidoarjo

Namun demikian, tidak dapat dipungkiri bahwa tantangan tetap ada. Beberapa pelaku UMKM menyatakan bahwa produk mereka justru laku keras di luar sistem e-Katalog karena sudah punya pasar khusus, seperti di Pabean Surabaya, untuk komunitas Madura dan pelanggan luar Jawa. “UMKM itu diundang... tapi tidak mau. Mungkin dia produksi, dia kirimnya ke Surabaya. Sudah punya pasar ke Surabaya, tapi tidak masuk e-Katalog. Jadi pasarnya di Surabaya, Pabean...” (Pak Sigit, Wawancara, 15 Mei 2025). Ini menunjukkan bahwa dalam upaya perluasan akses, tidak semua UMKM melihat urgensi masuk ke e-Katalog, karena segmentasi pasar mereka berbeda.

Oleh karena itu, pendekatan inovatif tidak hanya berupa pelatihan teknis, tetapi juga pendekatan persuasif berbasis segmentasi usaha. Upaya Dinas harus mempertimbangkan karakteristik, nilai tambah produk, serta saluran distribusi yang relevan bagi setiap UMKM. Dengan kata lain, inovasi dan perluasan akses e-Katalog UMKM di Sidoarjo telah menunjukkan kemajuan, tetapi masih menghadapi tantangan sosio-teknis dan segmentatif. Program ke depan perlu mengadopsi strategi hibrid antara digitalisasi dan penguatan pasar konvensional, serta melibatkan lebih banyak aktor seperti perguruan tinggi, komunitas kreatif, dan asosiasi pelaku UMKM. Di sinilah peran Dinas akan semakin vital sebagai fasilitator transformasi digital yang inklusif dan berkeadilan.

4. SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai peran Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sidoarjo dalam optimalisasi e-Katalog sebagai sarana pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), dapat disimpulkan bahwa dinas tersebut memainkan peranan yang cukup strategis dalam mendorong transformasi

digital sektor UMKM di wilayah Sidoarjo. Peran tersebut mencakup sebagai regulator yang menetapkan kebijakan teknis dan regulasi, fasilitator dalam bentuk pelatihan, pendampingan, serta dukungan teknis, dan sebagai dinamisator yang mendorong inovasi serta partisipasi pelaku usaha dalam memanfaatkan platform e-Katalog. Peran-peran ini secara langsung bertujuan untuk meningkatkan akses pasar UMKM melalui sistem pengadaan barang dan jasa pemerintah berbasis digital. Namun demikian, partisipasi UMKM dalam program e-Katalog masih tergolong sangat rendah. Dari sekitar 176.000 pelaku UMKM yang tercatat di Kabupaten Sidoarjo, hanya sekitar 1.700 UMKM atau sekitar 1% yang telah bergabung dalam sistem e-Katalog. Rendahnya tingkat partisipasi ini disebabkan oleh berbagai kendala, di antaranya adalah kurangnya literasi digital, keterbatasan akses terhadap informasi mengenai prosedur pendaftaran e-Katalog, serta minimnya pemahaman mengenai manfaat jangka panjang penggunaan platform digital dalam sistem pengadaan pemerintah. Temuan ini diperkuat oleh hasil wawancara dengan pelaku UMKM dan pejabat Dinas Koperasi, yang menyatakan bahwa sebagian besar pelaku usaha mikro masih belum terbiasa dengan penggunaan sistem elektronik dalam kegiatan bisnis mereka.

Lebih lanjut, pelaksanaan strategi optimalisasi e-Katalog oleh Dinas Koperasi sudah dilakukan melalui program pelatihan, sosialisasi, dan pendampingan teknis kepada pelaku UMKM, termasuk fasilitasi legalitas usaha dan kurasi produk agar memenuhi standar LKPP. Namun, pelaksanaan program ini belum merata dan masih terfokus pada kelompok UMKM tertentu yang telah memiliki kesiapan administratif dan teknologi. Hal ini mengindikasikan bahwa pendekatan yang diterapkan belum inklusif, sehingga belum menjangkau mayoritas pelaku UMKM skala mikro dan tradisional yang membutuhkan bimbingan lebih intensif.

Kendala lainnya yang teridentifikasi dalam penelitian ini adalah kurangnya sinergi antara Dinas Koperasi dengan stakeholder pendukung lainnya, seperti Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ), instansi pengguna anggaran, serta lembaga keuangan. Koordinasi lintas sektor masih belum optimal dalam mendukung penggunaan produk UMKM lokal oleh instansi pemerintah, sebagaimana yang diamanatkan dalam Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022. Selain itu, belum terdapat sistem evaluasi terstruktur yang mampu mengukur efektivitas dan dampak pemanfaatan e-Katalog terhadap pertumbuhan usaha dan kesejahteraan pelaku UMKM secara menyeluruh.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa meskipun Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sidoarjo telah berupaya menjalankan peran dan strategi dalam pemberdayaan UMKM melalui e-Katalog, namun efektivitas implementasinya masih terbatas. Program ini memiliki potensi besar dalam mendukung perluasan pasar dan mendorong digitalisasi UMKM, tetapi membutuhkan perbaikan dalam hal aksesibilitas, pendampingan, dan sinergi kelembagaan agar manfaatnya dapat dirasakan secara lebih luas dan berkelanjutan.

Saran

Berdasarkan temuan dan kesimpulan yang telah diuraikan, maka penulis memberikan beberapa saran yang ditujukan kepada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sidoarjo, pelaku UMKM, serta pemangku kepentingan terkait. *Pertama*, diperlukan upaya perluasan jangkauan program pelatihan dan

pendampingan digital yang menasar UMKM skala mikro dan nonbinaan. Dinas Koperasi dapat menjalin kerja sama lebih intensif dengan pemerintah desa, komunitas UMKM, serta lembaga pendidikan dalam menyelenggarakan pelatihan praktis yang berbasis komunitas dan menjangkau wilayah pinggiran. Dengan demikian, pelaku UMKM yang selama ini belum tersentuh program pendampingan dapat mulai memahami dan mengakses platform e-Katalog secara mandiri. *Kedua*, disarankan agar pemerintah daerah memperkuat sinergi lintas sektor, khususnya antara Dinas Koperasi, UKPBJ, dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pengguna anggaran, untuk memastikan bahwa belanja pemerintah diarahkan kepada produk lokal UMKM yang telah terdaftar di e-Katalog. Diperlukan integrasi sistem informasi dan komunikasi antarinstansi agar proses pengadaan barang dan jasa benar-benar memberdayakan pelaku usaha lokal, sebagaimana amanat dari regulasi nasional.

Ketiga, Dinas Koperasi perlu mengembangkan sistem monitoring dan evaluasi berbasis data yang dapat mengukur efektivitas program e-Katalog terhadap peningkatan pendapatan UMKM, perluasan pasar, serta kontribusinya terhadap pertumbuhan ekonomi lokal. Evaluasi ini penting untuk memastikan bahwa strategi yang diterapkan benar-benar berdampak dan dapat diadaptasi sesuai dengan kebutuhan pelaku usaha di lapangan. *Keempat*, peningkatan literasi digital harus dijadikan prioritas utama dalam agenda pemberdayaan UMKM. Dinas Koperasi dapat membuat modul pelatihan sederhana yang mencakup topik-topik seperti pendaftaran e-Katalog, fotografi produk, manajemen stok online, serta pengelolaan transaksi digital. Selain itu, penting juga membangun kepercayaan pelaku UMKM terhadap sistem digital dengan memberikan contoh sukses dan testimoni dari UMKM yang telah berhasil menggunakan e-Katalog. *Kelima*, pendekatan pemberdayaan harus berbasis segmentasi UMKM, yakni dengan mengidentifikasi tingkat kesiapan digital masing-masing kelompok usaha. UMKM yang masih konvensional membutuhkan pendampingan lebih dasar, sementara UMKM yang sudah digital-ready dapat diberikan pelatihan lanjutan seperti strategi branding online atau pengembangan toko daring. Dengan pendekatan yang lebih terstruktur dan adaptif, diharapkan seluruh lapisan UMKM dapat terlibat dalam proses digitalisasi secara berkelanjutan.

Secara keseluruhan, optimalisasi e-Katalog sebagai sarana pemberdayaan UMKM membutuhkan dukungan sistematis dari pemerintah daerah, partisipasi aktif pelaku usaha, serta kolaborasi antar pemangku kepentingan. Dengan komitmen bersama, Kabupaten Sidoarjo memiliki peluang besar untuk menjadi percontohan dalam implementasi digitalisasi UMKM berbasis pengadaan pemerintah.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Azizatun, B., Rahmawati, P. A., Neneng, R. J. P. D., & Ariani, C. (2024). Pemerataan digitalisasi UMKM di Desa Sepande Kabupaten Sidoarjo. *Media Pengabdian Kepada Masyarakat (MPKM)*, 3(1), 220-226.
- Bali Ekonomi Digital. (2023). Laporan Digitalisasi UMKM di Bali. Denpasar: Pemerintah Provinsi Bali.
- BPS DIY. (2023). Laporan Perkembangan Digitalisasi UMKM di Yogyakarta. Yogyakarta: BPS DIY.

- Badan Pusat Statistik Kabupaten Sidoarjo. (2023). Kabupaten Sidoarjo dalam Angka 2023. Diakses dari: <https://sidoarjokab.bps.go.id>
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Sidoarjo. (2024). Kabupaten Sidoarjo dalam Angka 2024. Sidoarjo: BPS.
- Bappeda Kabupaten Sidoarjo. (2023). Dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sidoarjo. Sidoarjo: Bappeda.
- Chaffey, D., & Ellis-Chadwick, F. (2020). *Digital Marketing: Strategy, Implementation and Practice*. Pearson Education.
- Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sidoarjo. (2024). Dokumen Pelaksanaan Program e-Katalog UMKM Tahun Anggaran 2023/2024.
- Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sidoarjo. (2024). Profil Dinas Koperasi dan Usaha Mikro. Diakses dari <https://diskopum.sidoarjokab.go.id>
- Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sidoarjo. (2024). Renstra Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Tahun 2021–2026. Diakses dari <https://diskopum.sidoarjokab.go.id>
- Evangeulista, R. (2023). *Digitalisasi UMKM: Strategi Bertahan di Era Ekonomi Digital*. Jakarta: Gramedia.
- Fiantika, F., Wasil, M., Jumiyati, S., Honesti, L., Wahyuni, S., Mouw, E., Jonata, Mashudi, I., Hasanah, N., Maharani, A., Ambarwati, K., Noflidaputri, R., Nuryami, & Waris, L. (2022). *Metode Penelitian Kualitatif*. PT. Global Eksekutif Teknologi.
- Habib, M. (2021). *Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Ekonomi Digital*. Jakarta: Gramedia.
- Handayani, S. (2023). *Peran UMKM dalam Ekonomi Nasional: Tantangan dan Peluang*. Yogyakarta: Deepublish.
- Isma, Y. S., Kardiati, D., Muslem, Fadhillah, S. K., KN, J., Akmal, F., & Chairunnisak, S. (2025, Juli). Transformasi Digital Sebagai Instrumen untuk Memperluas Aksesibilitas Layanan Publik. *Journal of Administrative and Social Science*, 6(2).
- Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia. (2023). *Data dan Statistik UMKM 2023*. Jakarta: Kemenkop UKM.
- Kurniawan, B. A. (2023). *Digitalisasi UMKM dan Perkembangannya di Indonesia*. Jakarta: Pustaka Ekonomi.
- Kurniawan, B. (2024). "Analisis Data UMKM di Kabupaten Sidoarjo." Laporan Penelitian, Universitas Airlangga.
- Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP). (2022). *Pedoman Penggunaan e-Katalog Lokal untuk UMKM*. Diakses dari: <https://www.lkpp.go.id>
- Mason, C., & Brown, R. (2014). *Entrepreneurial ecosystems and growth-oriented entrepreneurship*. OECD.
- Mannayong, J., Rizal, M., Herling, & Faisal, M. (2024). Transformasi Digital dan Partisipasi Masyarakat: Mewujudkan Keterlibatan Publik yang Lebih Aktif. *Jurnal Administrasi Publik*, XX(1).
- Moerad, T. (2021). "Peta UMKM di Kabupaten Sidoarjo." Laporan Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Sidoarjo.

- OECD. (2021). *The Digital Transformation of SMEs*. OECD Publishing.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2021). Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- Pemerintah Kabupaten Sidoarjo. (2021). Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sidoarjo 2021–2026. Sidoarjo: Pemkab.
- Pemerintah Kabupaten Sidoarjo. (2022). Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 14 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sidoarjo. Diakses dari <https://peraturan.bpk.go.id>
- Peraturan LKPP Nomor 9 Tahun 2021 tentang Toko Daring dan E-Katalog.
- Presiden Republik Indonesia. (2022). Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk UMKM.
- Peraturan Presiden RI Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengembangan Kewirausahaan Nasional Tahun 2021–2024.
- Puspitasari, D., & Rachmawati, R. (2021). Dampak Sosial Ekonomi Semburan Lumpur Lapindo di Kabupaten Sidoarjo. *Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota*, 32(2), 115–126.
- Rogers, E. M. (2003). *Diffusion of Innovations* (5th ed.). Free Press.
- Rogers, D. L. (2016). *The Digital Transformation Playbook: Rethink Your Business for the Digital Age*. Columbia University Press.
- Rostow, W. W. (1960). *The Stages of Economic Growth: A Non-Communist Manifesto*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Setda Kota Semarang. (2022). Implementasi Transformasi Digital UMKM di Semarang. Semarang: Pemerintah Kota Semarang.
- Setda Kabupaten Sidoarjo. (2023). Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kabupaten Sidoarjo 2023. Sidoarjo: Sekretariat Daerah.
- Setda Kabupaten Sidoarjo. (2024). "Laporan Tahunan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sidoarjo."
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Tambunan, T. (2019). *UMKM di Indonesia: Kebijakan, Strategi, dan Prospek*. Gadjah Mada University Press.
- Tarigan, A. (2022). *Pemberdayaan Ekonomi dan Peran UMKM dalam Pembangunan Nasional*. Bandung: Alfabeta.
- Wang, C. L., & Ahmed, P. K. (2007). Dynamic Capabilities: A Review and Research Agenda. *International Journal of Management Reviews*, 9(1), 31–51.
- Westerman, G., Bonnet, D., & McAfee, A. (2014). *Leading Digital: Turning Technology into Business Transformation*. Harvard Business Review Press.
- Yusuf, M. (2014). *Manajemen Pelayanan Publik*. Jakarta: Ghalia Indonesia